



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YADI JAYA RUCHANDI
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 210181

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 18.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 359 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 6.850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36.45 m2/36.45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.925.795.833

1. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 685.795.833
3. MOBIL, MERCEDES BENZ GLB 200 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. 6.400.182.492

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 6.117.660.883

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 33.143.639.208

III. HUTANG

Rp. 3.351.604.385

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 29.792.034.823

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.